

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

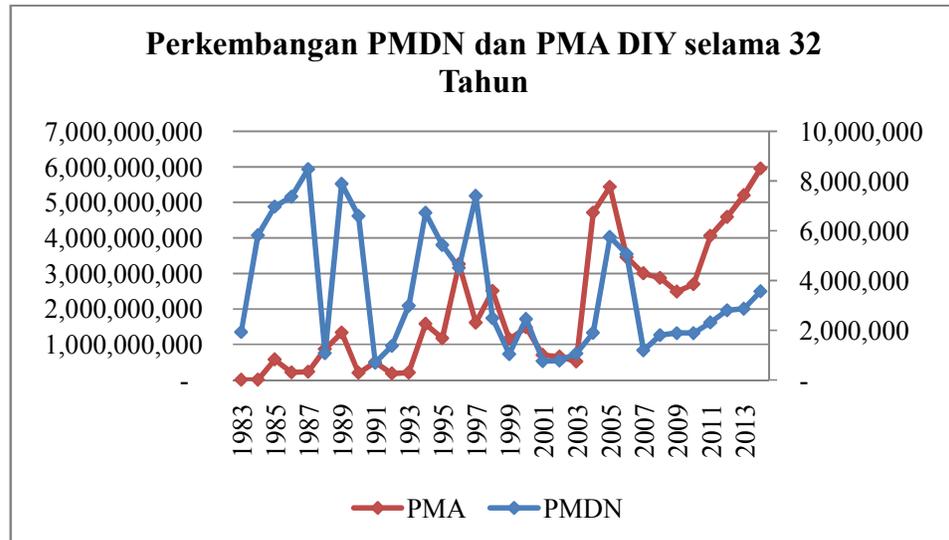
Indonesia sebagai negara berkembang kini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan ini merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya dapat dilihat pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan namun juga perlu dilihat dari bagian-bagiannya, yakni provinsi. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memotivasi peningkatan kreativitas dan inisiatif untuk dapat lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, terarah, agar pembangunan di tiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya (Nugroho,2002). Pembangunan di setiap provinsi maupun nasional membutuhkan pembangunan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik untuk menunjang laju pertumbuhan perekonomiannya. Kemudian pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi

sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004).

Pembangunan wilayah dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui kegiatan investasi baik yang bersumber dari dalam atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka dibutuhkan investasi pada semua sektor pembangunan. Besarnya investasi ini akan tergantung pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan akan investasi adalah dengan penanaman modal asing. Untuk negara-negara yang belum maju seperti Indonesia, penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan.

Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Sumantoro, 1983:9). Namun demikian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, selain kebijakan pemerintah setempat, faktor-faktor lain yang dapat mendorong arus penanaman modal di suatu provinsi adalah: Tingkat Inflasi, Jumlah Angkatan Kerja, dan Infrastruktur (Jalan).

**Gambar 1.1 Perkembangan PMDN dan PMA Daerah Istimewa Yogyakarta
1893-2014**



Sumber : data diolah 2015

Pada gambar 1.1 bisa dilihat perkembangan untuk PMDN dan PMA DIY pada tahun 1983-2014. Dimana untuk tiap tahunnya perkembangan PMDN mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1987 dimana peningkatan yang paling tinggi sebesar Rp.8.486.299, kemudian pada tahun 1991 dimana penurunan terendah terjadi sebesar Rp.695.397. Setelah itu kenaikan secara terus menerus terjadi pada tahun 2007-2014 dimana 2014 sebesar Rp.3.568.546. Kemudian untuk nilai PMA Yogyakarta seperti nilai PMDN mengalami kenaikan dan penurunan untuk tiap tahunnya. Dimana nilai PMA tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.5.955.853.842 dan nilai PMA terendah terjadi pada tahun 1983 yaitu sebesar Rp.1.216.805.

Penduduk DIY tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa dengan persentase yang hampir berimbang antara penduduk perempuan dan laki-laki yaitu masing-masing sebesar 50,81% dan 49,19%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 adalah

0,42%, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni sebesar 1,79%, diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,42%), Kabupaten Kulonprogo (0,19%), Kabupaten Gunungkidul (0,16%) dan Kabupaten Bantul (0,07%). Dengan luas terkecil, Kota Yogyakarta justru memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.246 jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Gunungkidul dengan luas terbesar menduduki peringkat terakhir kepadatan penduduk yaitu 462,33 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sleman 1.642 jiwa per km², Kabupaten Bantul 1.610 jiwa per km² dan Kabupaten Kulonprogo 641 jiwa per km² (Susenas, BPS, 2004).

Berdasarkan kelompok sektor, realisasi PMDN terbesar di DIY dilakukan pada kelompok sektor tersier dengan porsi sebesar 58,36 persen dari total realisasi PMDN. Kelompok sektor tersier terdiri dari kegiatan bangunan; hotel dan restoran; perdagangan; perumahan; pengangkutan; jasa lainnya; listrik, gas dan air minum. Sementara realisasi pada kelompok primer (pertanian dan pertambangan) porsinya hanya sebesar 0,96 persen. Investor domestik lebih berminat menanamkan modalnya di sektor hotel dan restoran (41,6 %). Kemudian diikuti oleh sektor industri tekstil (27,16 %) dan jasa lainnya (13,23 %) (BKPM DIY 2015).

Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) Secara sektoral, pada tahun 2013 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut

mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal dan peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Daerah Istimewa Yogyakarta masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Untuk mendukung pembangunan ini, Provinsi DIY telah menyusun dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013, yang salah satunya misinya adalah "Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera", serta sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif, maka dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah/swasta sangat diperlukan (RPJMD, 2013). Dengan tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi DIY ini menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia(BI) DIY, Arief Budi Santoso bahkan lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan IV 2014 sebesar 4,30. Selain itu juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,71%.Hal itu di mungkinkan terjadi akibat masih belum optimalnya belanja rutin maupun infrastruktur pemerintah daerah. Selain itu juga karena masih rendahnya investasi dan ekspor komoditas dari DIY. Namun demikian berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, selain kebijakan pemerintah setempat, faktor-faktor lain yang dapat mendorong arus penanaman modal di suatu provinsi adalah Tingkat Inflasi, Jumlah Angkatan Kerja, Infrastruktur (Jalan).

Tanpa ada bantuan investor asing, maka Indonesia khususnya di DIY akan kesulitan untuk membangun daerahnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari Indonesia yang masih menjadi Negara berkembang dengan ciri modal kurang, tabungan rendah dan investasi yang juga rendah memang memerlukan penanaman modal asing sebagai upaya tidak jatuh pada “lingkar setan kemiskinan”. Maka dengan alasan untuk melaksanakan pembangunan secara merata, pemerintah memberikan regulasi yang dapat mengontrol penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, kemudian Pemerintah Daerah melalui persetujuan Gubernur juga ikut membuat peraturan-peraturan yang berkaitan tentang penanaman modal asing sebagai upaya kerjasama internasional untuk mendukung pembangunan di daerahnya, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan adanya modal asing yang masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pemerintah juga akan lebih mudah untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di berbagai sektor yang dimiliki. Dapat dilihat ketika hadirnya investasi berupa pembangunan hotel-hotel sebagai upaya untuk mendukung sektor pariwisata yang menjadi unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para wisatawan lokal maupun manca Negara akan berbondong-bondong untuk datang ke DIY, yang sudah pasti kedatangan mereka akan menguntungkan pundi-pundi rupiah bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, misalnya yang paling sederhana bentuknya pajak yang harus dibayar oleh investor tersebut kepada pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun salah satu unsur faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu Inflasi. Inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang (BPS, 2000).Perkembangan tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 1983-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 perkembangan tingkat inflasi pada periode sebelum terjadi krisis ekonomi menunjukkan kecenderungan relatif kecil. Inflasi di Yogyakarta mengalami titik tertinggi pada tahun 1998 di mana inflasi terjadi mencapai 77,46 persen. Kondisi tersebut terjadi sebagai dampak dari guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setelah tahun 1998 tingkat inflasi mulai menurun pada tahun 1999, tingkat inflasi mengalami penurunan yang signifikan sehingga inflasi berada pada titik rendahnya, yaitu sebesar 2.52 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perekonomian DIY pada krisis ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah paska krisis ekonomi dan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok mendorong terjadinya pemuliharaan kondisi perekonomian (Bank Indonesia, 1999). Namun tingkat inflasi di Yogyakarta pernah mencapai dua digit pada periode paska krisis, yaitu pada tahun 2005 sebesar 14.98 dan 2006 sebesar 10.40. pada tahun 2005 kondisi itu disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM yang terutama didorong oleh kenaikan minyak dunia. Kemudian pada tahun 2006 inflasi turun secara perlahan tapi pasti, dan kembali meraih kestabilan makro ekonomi (Bank Indonesia, 2007).

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1983-2014 Dalam Bentuk Persen

| Tahun | Tingkat Inflasi (persen) | Tahun | Tingkat Inflasi (persen) |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1983 | 12.67 | 1999 | 2.51 |
| 1984 | 7.86 | 2000 | 7.32 |
| 1985 | 5.76 | 2001 | 12.56 |
| 1986 | 9.23 | 2002 | 12.01 |
| 1987 | 10.37 | 2003 | 5.73 |
| 1988 | 4.43 | 2004 | 6.95 |
| 1989 | 5.21 | 2005 | 14.98 |
| 1990 | 10.73 | 2006 | 10.40 |
| 1991 | 8.38 | 2007 | 7.99 |
| 1992 | 4.78 | 2008 | 9.88 |
| 1993 | 10.01 | 2009 | 3.60 |
| 1994 | 8.55 | 2010 | 7.38 |
| 1995 | 9.64 | 2011 | 3.88 |
| 1996 | 3.05 | 2012 | 4.31 |
| 1997 | 12.72 | 2013 | 7.32 |

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 1998 | 77.46 | 2014 | 5.68 |
|------|-------|------|------|

Sumber : Data Diolah 2015

Tingkat upah berpengaruh secara langsung terhadap investasi. Tingkat upah maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi sehingga mempengaruhi tingkat produksi. Tinggi rendahnya produksi di suatu kawasan akan mempengaruhi investasi di kawasan tersebut (Sukirno, 1996). Tingkat upah merupakan standar pengupahan yang digunakan oleh pelaku usaha atau industri dalam memberikan upah kepada tenaga kerja. Tinggi rendahnya tingkat upah ini akan mempengaruhi daya tarik investasi. Kemudian Menurut makmun (2004) ketersediaan tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah bahan mentah, memanfaatkan modal dan sebagainya) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai faktor penting dalam mendukung investasinya.

Todaro (2000:143) menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu Negara adalah faktor penting dan menentukan bagi pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Firdaus 2008 dalam (Permana dan Alla 2010) mengemukakan bahwa infrastruktur seperti jalan berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi pada suatu wilayah. Ragam kebijakan dalam rezim yang diberikan oleh pemerintah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laju arus investasi di Yogyakarta. Selain dari rezim itu sendiri ada hal lain yang juga ikut serta dapat mempengaruhi arus investasi tersebut yaitu penyediaan

fasilitas (prasarana) PMA. Sarana dan prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang sangat menentukan terealisasinya atau tidak suatu proyek investasi. Penyediaan fasilitas (prasarana) PMA di suatu daerah merupakan salah satu usaha yang sering dilakukan oleh suatu daerah untuk dapat menarik para investor melakukan investasi di daerahnya. Penyediaan fasilitas (prasarana) PMA antara lain berupa jalan, pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan sarana transportasi, serta kemudahan dalam perizinan yang diberikan oleh pemerintah penerima penanaman modal asing tersebut.

Tabel 1.2 Perkembangan Panjang jalan(KM) di Yogyakarta yang berada pada kondisi baik Tahun 1983-2014

| Tahun | Panjang Jalan (KM) | Tahun | Panjang Jalan (KM) |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1983 | 12.411 | 1999 | 156.709 |
| 1984 | 17.614 | 2000 | 193.434 |
| 1985 | 13.084 | 2001 | 121.410 |
| 1986 | 21.082 | 2002 | 67.318 |
| 1987 | 96.895 | 2003 | 10.353 |
| 1988 | 23.139 | 2004 | 4.137 |
| 1989 | 18.651 | 2005 | 2.076 |
| 1990 | 26.467 | 2006 | 5.143 |
| 1991 | 34.420 | 2007 | 5.478 |
| 1992 | 37.346 | 2008 | 5.478 |
| 1993 | 34.243 | 2009 | 10.355 |
| 1994 | 38.911 | 2010 | 11.603 |
| 1995 | 52.537 | 2011 | 10.478 |
| 1996 | 41.040 | 2012 | 1.757 |
| 1997 | 60.974 | 2013 | 18.130 |
| 1998 | 60.696 | 2014 | 18.758 |

Sumber : Data Diolah, 2015

Pada tabel 1.2 bisa dilihat perkembangan Panjang Jalan (KM) yang berada pada kondisi baik tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, bisa dilihat untuk tahun 2005 perkembangan kondisi jalan mengalami penurunan yang paling

rendah yaitu sebesar 2.076 km sedangkan untuk perkembangan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 193.434 km. Kemudian untuk tahun 2004-2008 kondisi jalan berada pada titik yang rendah.

Di samping keuntungan dan keleluasaanlah yang biasanya menyebabkan suatu daerah dilirik oleh investor asing, termasuk DIY. Sektor alam yang begitu menggoda dapat menghasilkan sebuah alam pariwisata yang sangat indah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Inflasi di Yogyakarta berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.
2. Apakah Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.
3. Apakah Infrastruktur Jalan berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi di Yogyakarta terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.

2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Penanaman Modal di Provinsi DIY pada tahun 1983-2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah kegiatan pembangunan perekonomian di Provinsi DIY.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.